

**PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH  
DAERAH BERBASIS AKRUAL, KOMPETENSI SUMBER DAYA  
MANUSIA DAN PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI  
AKUNTANSI DAERAH TERHADAP KUALITAS  
LAPORAN KEUANGAN  
(Studi Kasus Pada Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintahan  
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir)**

**SKRIPSI**



**Nama : Risqi Sepputra  
NIM : 222015169**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
2019**

**PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH  
DAERAH BERBASIS AKRUAL, KOMPETENSI SUMBER DAYA  
MANUSIA DAN PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI  
AKUNTANSI DAERAH TERHADAP KUALITAS  
LAPORAN KEUANGAN  
(Studi Kasus Pada Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintahan  
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir)**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana**



**Nama : Risqi Sepputra  
NIM : 222015169**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
2019**

### PENYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Risqi Sepputra

NIM : 222015169

Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

Judul : Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Dengan ini menyatakan:

1. Karya tulis adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana Strata 1 baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran data pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang 2019

yang membuat pernyataan



**Risqi Sepputra**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah  
Palembang

**TANDA PENGESAHAN SKRIPSI**

Judul : Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrua, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Nama : Risqi Sepputra  
NIM : 22 2015 169  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Program Studi : Akuntansi  
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik

Diterima dan Disahkan  
Pada tanggal, 2019

Pembimbing I

Betri, S.E., M.Si., AK., CA  
NIDN/NBM : 0216106902/944806

Pembimbing II

22/7-2019

Welly, S.E., M.Si  
NIDN/NBM : 0212128102/1085022

Mengetahui,  
Dekan  
u.b. Ketua Program Studi Akuntansi

Betri, S.E., M.Si., AK., CA  
NIDN/NBM : 0216106902/944806

## ABSTRAK

**Risqi Seputra/222015169/2019 Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrua, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintahan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir).**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah daerah berbasis akrua, kompetensi sumber daya manusia, dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi daerah terhadap kualitas laporan keuangan; (2) pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah daerah berbasis akrua terhadap kualitas laporan keuangan; (3) pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan; (4) pengaruh pemanfaatan sistem informasi akuntansi daerah terhadap kualitas laporan keuangan. Jenis Penelitian yang digunakan adalah asosiatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di kabupaten penukal abab lematang ilir yang berjumlah 18 OPD. Sampel penelitian ini adalah kepala subbagian keuangan, bendahara, dan staff/pegawai keuangan sebanyak 54 responden. Teknik pengumpulan data yaitu dengan menggunakan kuesioner. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kuantitatif dan analisis kualitatif.

Hasil penelitian menemukan bahwa : (1) ada pengaruh positif dan signifikan antara penerapan sap berbasis akrua, kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan sia daerah terhadap kualitas laporan keuangan; (2) tidak ada pengaruh antara penerapan sap berbasis akrua terhadap kualitas laporan keuangan; (3) ada pengaruh positif antara kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan; (4) ada pengaruh positif dan signifikan antara pemanfaatan sistem informasi akuntansi daerah terhadap kualitas laporan keuangan.

Kata Kunci: penerapan SAP, kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan SIA, kualitas laporan keuangan.

## PRAKATA



**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt., karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Organisasi Perangkat Daerah Di Pemerintahan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir)”**. Skripsi ini penulis ajukan dalam rangka memenuhi syarat untuk mengikuti ujian komprehensif pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.

Adapun penelitian ini terbagi menjadi lima bab berturut-turut, bab pendahuluan, bab kajian pustaka, bab metode penelitian, bab hasil dan pembahasan, dan bab simpulan dan saran. Penulis menyadari penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan penulisan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan, dorongan dan dukungan banyak pihak. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Allah SWT, kedua orang tuaku tercinta, Papa tercinta Yurizal dan Mama tercinta Ernawati, Saudari Rima Septiani, SKM., M. Kes dan adikku Rinaldi Jan Prakasa yang telah memberi semangat, mendoakan dan memberikan dorongan baik materil maupun spirit yang tiada hentinya. Penulis

juga mengucapkan terima kasih kepada bapak Betri, SE.,M.Si.,AK.,CA dan ibu welly, SE.,M.Si yang telah membimbing dan memberikan pengarahan serta saran-saran dengan tulus dan ikhlas dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta wakil-wakil Rektor beserta Staf karyawan/karyawati Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Drs. H. Fauzi Ridwan, M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf.
3. Bapak Betri, SE., M.Si., Ak., CA dan Ibu Nina Sabrina, SE., M.Si selaku ketua prodi dan sekretaris program studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. BapakBetri, SE., M.Si., Ak., CA dan Ibu Welly, SE., M.Si selaku dosen pembimbing skripsi saya.
5. Ibu Nurul Hutami Ningsih, SE., M.Si. selaku pembimbing akademik saya.
6. Bapak dan Ibu Dosen staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Pegawai di kantor Dinas Kabupaten PALI yang dengan tulus mengarahkan dan membantu saya.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirul kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam

menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah SWT membalas budi untuk seluruh bantuan yang telah diberikan guna menyelesaikan skripsi ini. Aamiin.

**Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.**

Palembang,.....2019

Penulis,

Risqi Sepputra



## DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN .....	
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
HALAMAN PRAKATA .....	v
HALAMAN DAFTAR ISI.....	viii
HALAMAN DAFTAR TABEL .....	xi
HALAMAN DAFTAR GAMBAR.....	xiii
ABSTRAK .....	xiv
ABSTRACT .....	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. LatarBelakangMasalah.....	1
B. RumusanMasalah .....	10
C. TujuanPenelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Landasan Teori.....	12
1. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis AkruL .....	12
2. Kompetensi Sumber Daya Manusia .....	16

3. Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah ..	20
4. Kualitas Laporan Keuangan .....	23
B. Penelitian Sebelumnya .....	26
C. Kerangka Pemikiran.....	31
D. Hipotesis.....	31
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Lokasi Penelitian .....	34
C. Operasionalisasi Variabel.....	34
D. Populasi .....	35
E. Data Yang Diperlukan.....	36
F. Metode Pengumpulan Data .....	37
G. Analisis Data dan Teknik Analisis .....	38
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Hasil Penelitian... ..	51
1. Gambaran Umum Kabupaten PALI.....	51
2. Gambaran Karakteristik Responden .....	52
3. Gambaran Karakteristik Variabel .....	54
4. Analisis Deskriptiv Variabel .....	58
5. Hasil Pengolahan Data .....	80
a. Uji Validitas.....	80
b. Uji Reabilitas .....	84

c. Uji Asumsi Klasik.....	85
d. Uji Hipotesis .....	89
e. Analisis Regresi Linier Berganda .....	93
B. Pembahasan Hasil Penelitian .....	96
1. Pengaruh Penerapan SAP, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.....	96
2. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah Berdasarkan AkruaL Terhadap Kualitas Laporan Keuangan .....	98
3. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan .....	99
4. Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap kualitas Laporan Keuangan .....	99

## **BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

A. Simpulan.....	101
B. Saran.....	101

## **DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **A. Latar Belakang Masalah**

Di Indonesia, berbagai peraturan dan pedoman telah diterbitkan terkait dengan laporan keuangan pemerintah daerah. Menurut Peraturan Pemerintah No. 101 tahun 2000 tentang pendidikan dan pelatihan jabatan pegawai negeri sipil, pemerintahan yang baik merupakan pemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektifitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh rakyat dalam proses pengelolaan keuangan, penyajian laporan keuangan serta akuntabilitas keuangan pemerintah. Beberapa upaya telah dilakukan pemerintah demi mewujudkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas, diantaranya diterbitkannya PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang ditetapkan pada tanggal 22 oktober 2010 menggunakan basis akrual, Hal ini perlu dilakukan agar laporan keuangan yang dihasilkan mudah dibaca dan dimengerti.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan menggambarkan pos-pos keuangan pemerintah daerah yang diperoleh dalam suatu periode kerja.

Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan wujud dari transparansi dan akuntabilitas suatu entitas serta media informasi akuntansi untuk bisa menyampaikan hasil kinerja pengelolaan keuangan kepada pihak lain. Menurut PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Informasi dalam laporan keuangan pemerintah dikatakan berkualitas jika informasi tersebut memenuhi kriteria dalam akuntansi pemerintahan yaitu relevan, andal, dapat dipahami dan dapat di bandingkan. Regulasi tersebut mengharuskan laporan keuangan disajikan bebas dari pengertian menyesatkan dan kesalahan material, objektif dan dapat diverifikasi.

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas berupa informasi keuangan. Informasi yang seharusnya disajikan dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah hendaknya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pemerintah (Siska, 2017). Laporan keuangan dapat menjadi acuan dalam pengambilan keputusan dan hal-hal yang dianggap penting bagi pihak pemerintah daerah. Pelaporan keuangan seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik.

Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga legislatif sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. (Ifat, 2018: 57).

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan No 71 tahun 2010, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) memiliki prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Ada delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah, yaitu basis akuntansi, prinsip nilai historis, prinsip realisasi, prinsip substansi mengungguli bentuk formal, prinsip periodisitas, prinsip konsistensi, prinsip pengungkapan lengkap, dan prinsip penyajian wajar. (Abdul, 2018: 15). Dalam pelaporan keuangan tersebut pemerintah dituntut untuk transparansi dalam memproses suatu laporan keuangan daerah. Oleh karena itu pemerintah harus menyampaikan laporan keuangan pemerintah daerah yang memenuhi semua prinsip akuntansi dalam pelaporan keuangan serta disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang telah diterima secara umum.

Menurut PP RI Nomor 56 tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan akuntansi daerah menyebutkan bahwa sistem informasi keuangan daerah adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah tidak dirancang untuk memenuhi tujuan spesifikasi dari masing-masing kelompok pengguna. Selain itu terdapat system informasi akuntansi keuangan daerah dimana system tersebut diterapkan

oleh pemerintah daerah untuk memproses dan mempermudah dalam pembuatan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Laporan keuangan baik tidak dapat dipisahkan dari faktor kompetensi sumber daya manusia. kompetensi sumber daya manusia merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang dalam suatu organisasi untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Kompetensi sumber daya manusia adalah satu kesatuan tenaga manusia dalam organisasi dan bukan hanya sekedar penjumlahan karyawan-karyawan yang ada. Sebagai kesatuan, sumber daya manusia dipandang sebagai suatu sistem dimana tiap-tiap karyawan berfungsi untuk mencapai tujuan organisasi (Matindas, 2013: 89).

Menurut Mardiasmo (2002: 146), dengan adanya kompetensi sumber daya manusia tersebut yang telah memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai hal-hal yang dikerjaka, sehingga laporan keuangan yang disusun dapat diselesaikan dan disajikan tepat pada waktunya. Semakin cepat laporan keuangan disajikan maka akan semakin baik dalam hal pengambilan keputusan.

Berdasarkan data pada badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan kabupaten penulal abab lematang ilir terdapat Aparatur Sipil Negara (ASN) yang rata-rata memiliki tingkat pendidikan formal SMA. Hal ini dapat dikatakan masih sedikitnya kapasitas sumber daya manusia yang masih memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi, sehingga menghasilkan laporan keuangan yang belum maksimal yang dapat dipakai oleh pengguna informasi tersebut. laporan keuangan pemerintah daerah harus disusun oleh personel yang memiliki pendidikan tinggi

dan mengerti cara menyusun laporan keuangan pemerintah daerah yang benar sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang telah ditetapkan.

Berdasarkan kutipan tersebut timbul pertanyaanmengetahui apakah laporan keuangan pemerintah daerah tersebut telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan maka laporan tersebut perlu di auditing. Auditing adalah pengumpulan serta pengevaluasian bukti-bukti atas informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian informasi tersebut dengan menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian informasi tersebut dengan criteria-kriteria yang telah ditetapkan (Abdul, 2018: 19). Pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah di laksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang hasil pemeriksaannya berupa opini. Menurut undang-undang pemerintah Republik Indonesia nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, opini merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan yang dilakukan BPK ini bertujuan untuk memberikan pendapat atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Opini BPK secara bertingkat terdiri dari: Tidak Wajar (TW), Tidak Memberikan Pendapat (TMP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan yang terbaik adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Novtania, dkk (2017) yang berjudul pengaruh system pengendalian intern dan system akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Hasil dari penelitian ini adalah Sistem Pengendalian Itern berpengaruh negatif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah



sedangkan penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Berarti, sistem pengendalian intern pada BPKAD Bolaang Mongondow utara yang telah dijalankan sudah baik namun dalam penerapannya belum efektif dan efisien sehingga berpengaruh terhadap kurangnya kualitas laporan keuangan pemerintah.

Penelitian yang dilakukan oleh Gyshella dkk (2017) yang berjudul pengaruh penerapan Sistem Pengendalian Intern dan implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Manado. Hasil dari penelitian ini adalah Sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Manado, sedangkan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Manado. Jadi, sistem pengendalian intern dan implementasi sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Indah dkk (2017) yang berjudul pengaruh system informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD kabupaten Aceh Utara. Hasil dari penelitian ini adalah system informasi akuntansi berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD Kabupaten Aceh Utara.

Penelitian yang dilakukan oleh Astika Dkk (2018) yang berjudul pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, dan system pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan

SKPD kota Tangerang Selatan. Hasil dari penelitian ini adalah Penerapan standar akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, Sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan RI, terdapat banyak kelemahan yang terjadi salah satunya kelemahan SPI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2018 yaitu kelemahan system pengendalian akuntansi dan pelaporan, seperti pencatatan belum akurat, proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan, system informasi yang tidak memadai, serta system informasi dan akuntansi tidak di dukung dengan sumber daya manusia (SDM) yang memadai. Selain itu Badan pemeriksaan Keuangan RI juga mengeluarkan temuan berupa ketidak patuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atas LKPD tahun 2017 yaitu belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan, telah ditemukan 860 kasus permasalahan yang nilainya sebesar Rp. 344.447.530.000,00 dan penggunaan uang atau barang untuk kepentingan pribadi yang ditemukan 60 kasus permasalahan yang nilainya sebesar Rp. 20.719.830.000,00.

Pemerintah provinsi Sumatera Selatan telah menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kepada Badan pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera selatan sebanyak 18 kabupaten/kota di Sumatera Selatan. Hasilnya adalah terdapat beberapa kabupaten/kota yang telah berhasil mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) akan tetapi terdapat satu

kabupaten yang masih mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yaitu kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI).

Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) merupakan salah satu kabupaten baru di provinsi Sumatera Selatan. Kabupaten penukal abab lematang ilir ini merupakan hasil pemekaran daerah dari kabupaten Muara Enim. Kab penukal abab lematang ilir resmi melepaskan diri dari kab Muara Enim dan disahkan pada tanggal 11 Januari 2013 oleh bupati Muara Enim yang menjabat pada saat itu. Kab penukal abab lematang ilir merupakan kabupaten yang masih banyak kekurangan di berbagai aspek, baik berupa teknologi, sumber daya manusia, pembangunan dan lainnya. Hal ini tentunya akan berdampak pada laporan keuangan pemerintah daerah kab penukal abab lematang ilir.

**Tabel I.1**  
**Hasil Opini BPK atas LKPD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir**  
**Tahun 2014-2017**

<b>Tahun</b>	<b>Hasil Opini BPK</b>
2014	TMP (Tidak Memberikan Pendapat)
2015	WDP (Wajar Dengan Pengecualian)
2016	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
2017	WDP (Wajar Dengan Pengecualian)

Sumber : bpk.ri.go.id 2019

Kabupaten penukal abab lematang ilir sempat mengalami peningkatan opini dari laporan pemerintah daerahnya. Hal ini sesuai tabel 1 yang menunjukkan bahwa dari tahun 2014 sampai 2017 kab penukal abab lematang ilir mengalami peningkatan opini. Berdasarkan LHPs I tahun 2018, kab pali tahun 2014

mendapatkan opini tidak memberikan pendapat (TMP) dikarenakan sumber daya manusia yang kurang sehingga masih sulit untuk membuat laporan keuangan, ditahun 2015 mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP), ditahun 2016 mengalami peningkatan sekaligus pertama kali mendapatkan opinin wajar tanpa pengecualian (WTP), tetapi di tahun 2017 kab penukal abab lematang ilir mengalami penurunan dan mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP), (BPK. RI; 2018).

Sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan perwakilan Sumatera Selatan, kab penukal abab lematang ilir (PALI) ditahun 2017 mendapatkan penurunan. Apabila sebelumnya kabupaten pali mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP), ditahun 2017 mendapatkan predikat wajar dengan pengecualian (WDP).

Pada tahun 2017 kabupaten penukal abab lematang ilir mendapat opini WDP, ditemukan temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu terdapat dana APBD yang diterima pemerintah daerah lebih dari 1 T tetapi dana tersebut belum terelasi secara penuh seperti pembangunan infrastruktur, jalan kabupaten, terdapat rancangan kerja anggaran yang tidak di laporkan oleh beberapa perangkat pemerintah serta pencairan dana desa tahap kedua di beberapa tempat 40% belum dilaporkan penggunaanya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul, **Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrua, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap**

## **Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir).**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang, maka permasalahan yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah daerah berbasis akrual, kompetensi sumber daya manusia, dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan (Studi kasus pada Dinas-dinas di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir)?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah daerah berbasis akrual, kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan (Studi Kasus Pada Organisasi Perangkat Daerah Di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir).

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Bagi Penulis**

Hasil penelitian ini untuk menambah pengetahuan dan memperluas wawasan tentang penerapan standar akuntansi pemerintah daerah berbasis akrual, kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan.

#### **2. Bagi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir**

Hasil penelitian ini membantu Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagai acuan untuk mengelola keuangan daerah dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan.

3. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber-sumber informasi, referensi tambahan, menambah ilmu pengetahuan, serta menjadi bahan acuan atau kajian bagi pihak-pihak yang akan mengadakan penelitian selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim (2018). *Akuntansi Sektor Publik: Teori, Konsep, dan Aplikasi (Dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ali, Pratiwi (2016). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Aparatur dan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi SI)*, Vol. 3 No 1 P.1-12.
- Anwar Prabu Mangkunegara (2012). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Pustaka Pelajar
- Astika Rahmawati, (2018). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Kota Tangerang Selatan. *E-Journal SI 2*(1). Diakses tanggal 10 April 2019.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (2018) *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2018*. diakses pada Oktober 2018. Jakarta: <https://www.bpk.go.id>.
- Danang Sunyoto (2013). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Pustaka Baru.
- Dunia Akuntansi dan Manajemen. 31 Maret 2008. Sistem Informasi Akuntansi.
- Edy Sutrisno, (2009). *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Cetakan ke 10, Januari 2019.
- Geogre Bodnar (2004). *Sistem Informasi Akuntansi*. Kab Sleman, Yogyakarta: Andi.
- Gyshella, (2017). Analisis Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kota Manado). Diakses pada tanggal 11 April 2019. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 12*(2), 2017, 950-962
- Ifat Fauziah (2018). *Dasar-Dasar Akuntansi untuk Pemula & dan Orang Awam*. Bandung: Serambi Baru.
- Indana Zulfah dan Sri Wahyuni (2017). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada SKPD Kabupaten Aceh Utara. Diakses pada tanggal 9 April 2019. *Jurnal Akuntansi dan Pembangunan | Volume 3 | Nomer 2 | November 2017*.

- I Wayan (2017). Pengaruh Akuntansi Berbasis Akrua, Sistem Pengendalian Intern, dan Motivasi Kerja Pada Kualitas Laporan Keuangan (studi kasus pada SKPD Kab Gianyar). *Jurnal Nominal Volume VI No 2 Tahun 2017*. P.14-28.
- Mardiasmo (2002) *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo (2009) *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Matindas, Rudolf Wennemar, (2013) *Manajemen Sumber Daya Manusia, Lewat Konsep Ambisi, Kenyataan dan Usaha*. Jakarta: Edisi II, Grafiti.
- Novtania Mokoginta, (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. *E-Journal SI*. Diakses tanggal 12 April 2019. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 12(2), 2017, 874-890.
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Akuntansi Daerah.
- Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Pujanira, Putu Ratih,, I Made Pradana Adiputra, dan Ananta Wikrama T. Atmaja (2015). Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan.). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi SI)*, Vol. 3 No. 1 P. 1-12.
- Pujanira, Putriasri. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DIY. *Jurnal Nominal Volume VI Nomor 2 Tahun 2017*. P. 14-28.
- Romie Priyastama (2017). *Bukti Kuasai SPSS Pengolahan Data & Analisis Data*. Jakarta: Gudang Penerbit.
- Sadili Samsudin (2009) *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Pustaka Setia.



Sugiyono (2018) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono (2017) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Surya A (2017). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi kasus pada kabupaten ogan ilir).*Jurnal Akuntansi, Volume 3 No 1 Februari 2017*. P.105-120.

Uma Sekaran (2017) *Metode Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.

V. Wiratna Sujarweni. 2014. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press

Zulkifli Ar (2018). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul (Studi kasus pada instansi pemerintah Gunung Kidul DIY). *Jurnal Akuntansi vol 3 NO 2 Maret 2018*. P 82 – 95.